

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, bahwa mengenai pemerintahan desa telah diatur sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan. Kemudian, mengenai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Fungsi Lembaga Sosial Desa, bahwa suatu lembaga yang berhubungan dengan hal-hal penyempurnaan dan fungsi lembaga desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Selanjutnya, pada Undang-Undang tersebut dijelaskan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri (kemendagri) Nomor 27 Tahun 1984 Tentang Susunan dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Setelah itu, ditingkat Nasional telah dideklarasikan bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) menjadi lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yaitu organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk atas dasar peraturan atau Undang-Undang yang

telah ditentukan dan ditetapkan dalam pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat sejahtera.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) merupakan sebuah institusi yang memiliki peran, tugas dan fungsi dalam kegiatannya sebagai mitra kerja pemerintahan desa, penampung dan penyalur dari aspirasi-aspirasi masyarakat desa sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, merencanakan dan menyusun pelaksanaan pembangunan, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat maupun swadaya gotong royong dalam pembangunan partisipatif untuk membangun atau meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Oleh karena itu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) suatu lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, sehingga pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk memadukan pelaksanaan dari berbagai kegiatan dan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 12 Tentang Desa bahwa pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya dalam membangun kesadaran masyarakat, kemandirian masyarakat, kesejahteraan dan meningkatkan kebutuhan masyarakat desa. Kemudian, pada Pasal 1 Ayat 8 disebutkan bahwa pembangunan desa merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pada Bab IX Pasal 78 Ayat 1 bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman modern mampu mempengaruhi kehidupan masyarakat desa, hal tersebut berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan masyarakat desa berupa pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dan peningkatan-peningkatan dalam pembangunan (infrastruktur). Dengan demikian, hal tersebut sangat mendukung atas kemajuan masyarakat terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan dan meningkatkan potensi masyarakat yang dibantu dengan daya dukung kemajuan di zaman modern pada perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Adapun munculnya berbagai isu-isu atau permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu ketidakberdayaan masyarakat. Seiring perkembangan zaman modern perubahan-perubahan terus terjadi dikalangan masyarakat secara lambat maupun cepat bahkan pesat. Isu-isu sosial atau permasalahan sosial yang terjadi dikalangan masyarakat diantaranya mengenai lingkungan, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Adapun, seperti yang disampaikan oleh Agus Ahmad Safe'i (2017:166) Kompleksitas permasalahan masyarakat terus meningkat. Sementara itu, interpendensi antarmanusia, manusia dengan kelompok, manusia dan berbagai sector kehidupan, sehingga semakin sulit seorang individu untuk bekerja sendiri dalam mendorong perubahan. Gerakan perubahan masyarakat yang diupayakan oleh masyarakat sendiri dan diarahkan pada tercapainya kondisi ideal bagi masyarakat bersangkutan, baik dalam sector social, ekonomi, kesehatan,

lingkungan, dikenal dengan istilah *community development*, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah “pengembangan masyarakat”.

Isue-isue sosial atau masalah sosial kerap terjadi di lingkungan masyarakat baik dari aspek pendidikan, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Masalah sosial atau isue sosial merupakan suatu keadaan, kondisi, situasi atau perilaku yang tidak diharapkan, tidak diinginkan, yang bertentangan sehingga kondisi atau keadaan masyarakat yang ada tidak ideal atau tidak sesuai harapan. Adapun, isue sosial atau masalah sosial yang terjadi di masyarakat Cisomang Barat dari berbagai bidang diantaranya pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana (infrastruktur jalan), lingkungan hidup, sosial budaya, pemerintahan, ekonomi, dan pemuda dan olahraga.

Isu sosial yang menarik dan sering terjadi dikalangan masyarakat salah satunya mengenai lingkungan (sanitasi lingkungan), dalam aspek pembangunan sanitasi lingkungan atau yang sering dikenal dengan kesehatan lingkungan karena masyarakat akan senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya, sanitasi lingkungan yang sehat, bersih dan terpelihara kelestarian lingkungannya.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. Q.S. Ar-rum 30:41.

Adapun beberapa kerusakan masalah sanitasi lingkungan seperti limbah (kotoran hewan atau manusia dan sampah), drainase, penebangan pohon, air dan penurunan daya dukung lingkungan yang diakibatkan oleh perilaku masyarakat diantaranya;

1. Limbah : pembuangan sampah, kotoran hewan, pembuangan kotoran manusia (tinja), banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan seperti di lahan perkebunan, lahan pinggir jalan dan saluran air/drainase, adapun dengan cara membakar sampah.
2. Sektor Drainase : pembangunan drainase dengan kesesuaian AMDAL, di beberapa RW air sering meluap dan memenuhi jalan \pm 400 M sehingga sulit dilalui, jika musim hujan air sering meluap ke jalan..
3. Penebangan pohon : penebangan pohon atau perusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perilaku masyarakat.
4. Sumber Daya Air : kebutuhan sumber daya air, penyediaan air bersih. Di beberapa RW/RT memerlukan air bersih untuk kebutuhan pokok, minum, memasak dan lain sebagainya.
5. MCK umum, pembangunan di beberapa RW diperlukan MCK umum untuk kebutuhan umum (masyarakat). Dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dibutuhkan pembangunan RTLH di beberapa RW/RT.

Permasalahan mengenai sanitasi lingkungan dapat merusak bahkan membahayakan bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya, hal tersebut akibat

dari kurang dan minimnya kesadaran masyarakat. Sehingga, terjadinya kerusakan terhadap lingkungan yang merupakan suatu permasalahan mental sosial masyarakat. Oleh sebab itu, kegiatan bersanitasi suatu usaha untuk menciptakan kesadaran masyarakat dengan memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan sanitasi lingkungan, menjaga kebersihan sanitasi lingkungan yang akan berpengaruh pada kelestarian lingkungan agar terhindar dari penyakit dan gangguan kesehatan.

Pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan sanitasi lingkungan ialah membentuk masyarakat dari tidak berdaya menjadi berdaya dan mandiri terhadap kekuatan dan kemampuan atau potensi yang dimiliki masyarakat desa sehingga menuju masyarakat madani. Adapun kekuatan dan kemampuan atau potensi yang dimiliki masyarakat desa dari berbagai aspek yaitu fisik atau non fisik dan material, manajemen institusi atau organisasi, membangun inovasi dan kreativitas ekonomi, menciptakan dan meningkatkan kerjasama, kekuatan intelektual atau wawasan pengetahuan masyarakat, membangun komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan yang telah disepakati bersama dan kemandirian masyarakat dari tidak berdaya menjadi berdaya. Sehingga, hasil jangkauan dari capaian program pembangunan yang telah disepakati yaitu untuk membentuk masyarakat yang berdaya dan mandiri secara berfikir, kesadaran dan tindakan atau bertindak.

Tidak tercapainya suatu pembangunan merupakan salah satu ketidak berhasilan pelaksanaan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam bidang sanitasi lingkungan. Oleh karena itu, baik peran

pemerintahan desa dan lembaga atau instansi desa harus merencanakan dan membuat program-program pembangunan untuk mewujudkan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan pembangunan partisipatif dengan melibatkan peran masyarakat dalam pemberdayaan pembangunan.

Pembangunan sanitasi lingkungan merupakan usaha menciptakan dan membangun keadaan atau perilaku hidup sehat dengan mengutamakan kebersihan dan kesadaran masyarakat dalam melakukan aktivitas maupun perilaku untuk menghindari gangguan terhadap lingkungan sekitar dan kesehatan masyarakat. Sanitasi lingkungan merupakan status kesehatan lingkungan yang mencakup beberapa aspek antara lain pembuangan kotoran (limbah), sampah perumahan, penyediaan air bersih dan sebagainya. Lingkungan sosial serta kelangsungan kehidupan manusia akan berdampak pada kesehatan masyarakat dan kehidupan sosial lainnya. Oleh sebab itu, sangat perlu adanya kebijakan tentang sanitasi dimana sangat mempengaruhi seluruh elemen kehidupan masyarakat melalui sosialisasi, penyuluhan dan pemahaman pengetahuan atau kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya.

Pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan lingkungan pedesaan sebagai sasaran yang ditetapkan, pembangunan yang berpusat pada rakyat (masyarakat) lebih menekankan pada pemberdayaan (*empowerment*), yang memandang inisiatif-kreatif dari rakyat sebagai sumber daya utama dalam pembangunan dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang akan dicapai proses pembangunan terhadap sanitasi lingkungan erat kaitannya dengan keberlangsungan kehidupan masyarakat sehari-hari karena hal

tersebut mempengaruhi terhadap kenyamanan, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat dilingkungannya. (Kusnaka Adimihardja, 2003:2).

Paradigma Kusnaka Adimihardja merupakan pemberdayaan yang tepat dalam pemberdayaan pembangunan lingkungan desa bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan sanitasi lingkungan desa akan terrealisasikan dan berkelanjutan apabila masyarakat dan pemerintah desa ikut serta berperan aktif dalam membangun pemberdayaan masyarakat desa. Hal tersebut merupakan dari perannan tugas LPMD dalam terciptanya pembangunan partisipatif.

Desa Cisomang Barat merupakan salah satu desa di wilayah Cikalong Wetan dengan luas wilayah \pm 383, 484 Ha, Luas darat 325. 300 Ha, Luas sawah 58. 184 Ha. Desa Cisomang Barat suatu daerah perbukitan dengan iklim rata-rata 22°C daerah ketinggian 700 meter dari permukaan laut, dengan luas batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara (Desa Sawit Kec. Darangdan Kab. Purwakarta), sebelah timur (Desa Wangunjaya), sebelah selatan (Desa Ciptagumati), sebelah barat (Desa Tenjolaut). Penduduk Desa Cisomang Barat sebagian besar mata pencaharian petani, buruh tani, dagang dan buruh. Berdasarkan administratif dan demografi Desa Cisomang Barat terdiri dari 4 Dusun, 15 Rukun Warga dan 49 Rukun Tetangga.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Cisomang Barat memiliki peran penting bukan hanya sebagai mitra kerja pemerintah desa untuk mewujudkan pembangunan lingkungan desa. Akan tetapi, untuk memenuhi dan menyalurkan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan sanitasi lingkungan di

Desa Cisomang Barat sehingga diperlukan aspirasi-aspirasi masyarakat serta partisipasi masyarakat. Kemudian, kebijakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam meningkatkan pembangunan sanitasi lingkungan yang bertujuan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat mengenai pembangunan di Desa Cisomang Barat yang berkelanjutan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan partisipatif.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik terhadap isu sosial mengenai lingkungan (sanitasi lingkungan) dalam meningkatkan pembangunan sanitasi lingkungan sebagai tercapainya pembangunan partisipatif. Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul “PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SANITASI LINGKUNGAN CISOMANG BARAT”

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian, penulis mengambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam meningkatkan pembangunan sanitasi lingkungan di Desa Cisomang Barat?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat upaya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam meningkatkan pembangunan sanitasi lingkungan di Desa Cisomang Barat?

3. Bagaimana hasil capaian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam meningkatkan pembangunan sanitasi lingkungan di Desa Cisomang Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berupa pernyataan-pernyataan singkat yang akan dicapai melalui kegiatan penelitian untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk menjawab yang telah dirumuskan:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam meningkatkan pembangunan sanitasi lingkungan di Desa Cisomang Barat?
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor pendukung dan penghambat upaya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam meningkatkan pembangunan sanitasi lingkungan di Desa Cisomang Barat?
3. Untuk mengetahui hasil capaian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam meningkatkan pembangunan sanitasi lingkungan di Desa Cisomang Barat?

1.4. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian dari hasil penelitian ini, baik secara akademis maupun secara praktis:

1. Secara Akademis

Kegunaan penelitian secara akademis atau teoritik mampu memberikan hasil penelitian bagi pengembangan konsep-konsep keilmuan sesuai dengan program studi atau jurusan. Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan

informasi ilmiah atau pengetahuan yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat salah satunya Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Pembangunan Sanitasi Lingkungan.

2. Secara Praktis

Kegunaan penelitian secara praktisi mampu memberikan hasil penelitian yang bisa digunakan, dilihat dari sudut obyek penelitian baik dari lembaga atau tempat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat berupa pemikiran dan masukan. Salah satunya, berkaitan dengan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Pembangunan Sanitasi Lingkungan.

1.5. Landasan Pemikiran

Landasan pemikiran merupakan sebuah penelitian kualitatif yang sifatnya bisa berubah-ubah. Namun untuk menguji kelayakan dan kesesuaian harus adanya perbandingan dari aspek:

1. Hasil Penelitian Sebelumnya

Dalam penelitian ini menggunakan hasil penelitian-penelitian seperti skripsi mengenai pemberdayaan masyarakat dan pembangunan, penelitian yang akan dilakukan mengenai peran LPMD dalam meningkatkan pembangunan melalui sanitasi lingkungan, menggunakan beberapa kepustakaan.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh oleh Nasehadin, mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2014 yang berjudul “Upaya Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Cibiruhilir (Studi Deskriptif LPMD Cibiruhilir Kec. Cileunyi Kab. Bandung)". Skripsi ini membahas sebuah program LPMD diantaranya Rumah tidak layak huni, dalam membentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Cibiruhilir.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Gilang Ramadhan, mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2018 berjudul "*Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*". Skripsi ini merupakan Studi Deskriptif, membahas seputar bagaimana proses peran dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan LPM sehingga apa hasil yang dicapai bersama.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Wahyudi, mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2007 berjudul "*Pengembangan Masyarakat Berwawasan Lingkungan Hidup Melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (Penelitian di LSM Yayasan Sumber Ilmu Jln. Islamic Center No. 57 Cikadut Bandung)*". Skripsi tersebut membahas mengenai pengembangan masyarakat yang berwawasan lingkungan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dengan demikian, LSM ini sebuah organisasi masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah dalam melaksanakan pengembangan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan pembangunan berkelanjutan.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Wirawan, mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Mulawarman. Dengan judul “*Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur*”, jurnal ini membahas tentang pelaksanaan fungsi LPM dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Rizki R, Imam H dan Heru R, Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Jurnal tersebut berjudul “*Implementasi Kebijakan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*”, jurnal ini membahas tentang peningkatan program pembangunan desa melalui LPM, jurnal tersebut dalam pelaksanaan belum cukup baik dan belum optimal. Hal ini, kurangnya program pihak LPM bahkan beberapa fungsi LPM belum memiliki program yang akan dilakukan. Adapun masyarakat yang belum tahu fungsi LPM, kurangnya SDM dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

2. Landasan Teoritis

Berkaitan dengan topik penelitian yang penulis lakukan ada landasan teori yang penulis gunakan untuk pembahasan tersebut dengan tujuan supaya penelitian yang penulis lakukan terarah dan tepat. Dalam hal ini, teori yang akan dijadikan sebagai acuan grand teori dalam melakukan penelitian penulis salah satunya teori pemberdayaan masyarakat menurut Edy Suharto dan teori sanitasi lingkungan.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa peran (*role*) merupakan sebuah aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila kedudukan (*status*) melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya maka ia melaksanakan peranannya. Dengan demikian, peran tersebut suatu kedudukan berpengaruh terhadap hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai statusnya (Soerjono Soekanto, 2003: 243).

Institution atau Lembaga kemasyarakatan merupakan kumpulan norma-norma sosial yang dianggap dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai pola kemasyarakatan yang berlaku. Dalam hal ini perilaku seseorang secara nyata ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, sedikitnya tidak berlaku atau dianggap sebagai perbuatan yang sekunder. Keberlakuan lembaga kemasyarakatan biasanya ditentukan oleh faktor kepentingan umum, seperti kepentingan kesejahteraan bersama, gotong royong, dan berbagai kebutuhan sosial lainnya (Abdul Syani, 2012:79).

Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan lembaga yang menampung partisipasi masyarakat, aspirasi atau kebutuhan masyarakat, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Dengan demikian, LPMD merupakan wadah partisipasi masyarakat.

Sebuah lembaga atau organisasi dari setiap lembaga atau organisasi demikian juga dengan LPMD memiliki berbagai macam karakteristik ciri khas dalam menjalankan program kerja atau tugas, wewenang, kewajiban atau tanggung jawab serta peraturan yang telah disepakati oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sehingga, setiap para anggota dari organisasi atau lembaga tersebut menjalankannya sesuai dengan peraturan yang disepakati atau ditetapkan. Adapun program kerja merupakan kegiatan organisasi dalam melaksanakan suatu program kerja berdasarkan peraturan-peraturan yang disepakati oleh organisasi atau lembaga tersebut, sehingga segala pekerjaan tertata rapi dan dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap anggotanya atau kadernya.

Menurut Bambang Trisantoro Soemantri (2011: 20), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki tugas dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Pasal 91 mengenai Desa. Selain itu, LPM/LPMD memiliki tugas dan fungsi dalam untuk menampung aspirasi masyarakat, menyalurkan kebutuhan masyarakat dan tentunya sebagai mitra kerja Pemerintah Desa.

Adapun menurut Dubois dan Miley (1996) mengenai pembangunan sebagian dari pemberdayaan, bahwa orientasi dalam memandang permasalahan menentukan dalam strategi intervensi program. Orientasi faktor pembangunan dapat menjadi faktor determinan pilihan strategi penanganan masalah sosial secara tradisional atau berbasiskan pemberdayaan (Kusnaka Adimihardja, 2003: 8).

Dalam mencapai pembangunan yang dilandasi dengan pemikiran partisipasi merupakan suatu program, proyek atau kegiatan pembangunan masyarakat yang datang dari “atas” atau dari “luar” komunitas yang sering gagal dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Oleh karena itu, strategi pembangunan masyarakat memfokuskan pada partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk strategi pembangunan masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif. Untuk itu diperlukan seperangkat teknik-teknik yang dapat menciptakan kondisi adanya keberdayaan masyarakat melalui proses pemberdayaan secara partisipatif melalui pembangunan berkelanjutan atau pembangunan partisipatif (Kusnaka Adimihardja, 2003: 23).

Pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan masyarakat desa dengan partisipasi dari masyarakat maka penting dengan adanya organisasi atau lembaga yang berfungsi sebagai wadah partisipasi dan pengelola kegiatan pembangunan. Dengan demikian, lembaga yang dimaksud yakni Lembaga Kemasyarakatan salah satunya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai wadah bagi partisipasi masyarakat dengan meningkatkan pembangunan yang merupakan sebagai pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya menurut Soekidjo Notoatmodjo Kesehatan lingkungan yaitu suatu kondisi atau keadaan lingkungan yang berpengaruh positif terhadap terwujudnya status kesehatan yang optimal bagi lingkungan dan masyarakat. Ruang lingkup kesehatan lingkungan tersebut antara lain mencakup: perumahan sehat, pengendalian pembuangan limbah (tinja, sampah), penyediaan air bersih,

rumah hewan ternak (kandang). Adapun yang dimaksud dengan usaha kesehatan lingkungan yaitu suatu usaha untuk memperbaiki dan mengoptimalkan lingkungan hidup dengan terwujudnya kesehatan yang optimum bagi manusia dengan lingkungannya (Soekidjo Notoatmodjo. 2011:169).

Secara konseptual, kata pemberdayaan atau pemberkuasaan “*empowerment*” (pemberdayaan) berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pada pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan terbentuk pada relasi sosial, sehingga kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan tersebut, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna (Edi Suharto, 2005).

Pemberdayaan merupakan terjemahan dari istilah *empowerment*, pemberdayaan secara leksikal pemberdayaan berarti penguatan. Adapun secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya diserupakan dengan istilah pengembangan, (Nanih Machendrawaty, Agus Ahmad Safei, 2001: 41). Dengan demikian, Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengembangkan potensi-potensi atau kebutuhan yang dimiliki masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mandiri dan sejahtera dalam mencapai pemberdayaan masyarakat.

Selain itu menurut Edi Suharto pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat,

termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara ekonomi, sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, memiliki mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan sehingga mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan kehidupan sosialnya. Dengan demikian, pemberdayaan sebagai tujuan yang digunakan untuk indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai langkah sebuah proses (Edi Suharto, 2005: 59-60).

Pemberdayaan masyarakat atau pengembangan masyarakat adalah “*The process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective action*”. Secara spesifik pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan upaya untuk penyaluran atau memenuhi kebutuhan masyarakat atau masyarakat yang tertindas disebabkan oleh kemiskinan atau diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, gender, kecacatan dan usia (Edi Suharto, 2005: 38).

Menurut Ife (1995: 61-64) dalam Edi Suharto, pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan tersebut tidak hanya mengenai kekuasaan politik dalam arti sempit, akan tetapi kekuasaan atau penguasaan klien. (Edi Suharto, 2005: 59):

- 1) Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
- 2) Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- 3) Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- 4) Lembaga-lembaga: kemampuan untuk menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, lembaga pendidikan, dan lembaga atau komunitas kesehatan.
- 5) Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
- 6) Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
- 7) Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Adapun strategi pemberdayaan masyarakat, Parson *et.al.* (1994) dalam kutipan Edi Suharto (2005: 66), menyatakan bahwa pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, mezzo dan makro.

Dalam pemberdayaan masyarakat, bahwa dengan ketetapan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Raad (13):11:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ.

Artinya:

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (Q.S. Ar-rad 13:11).

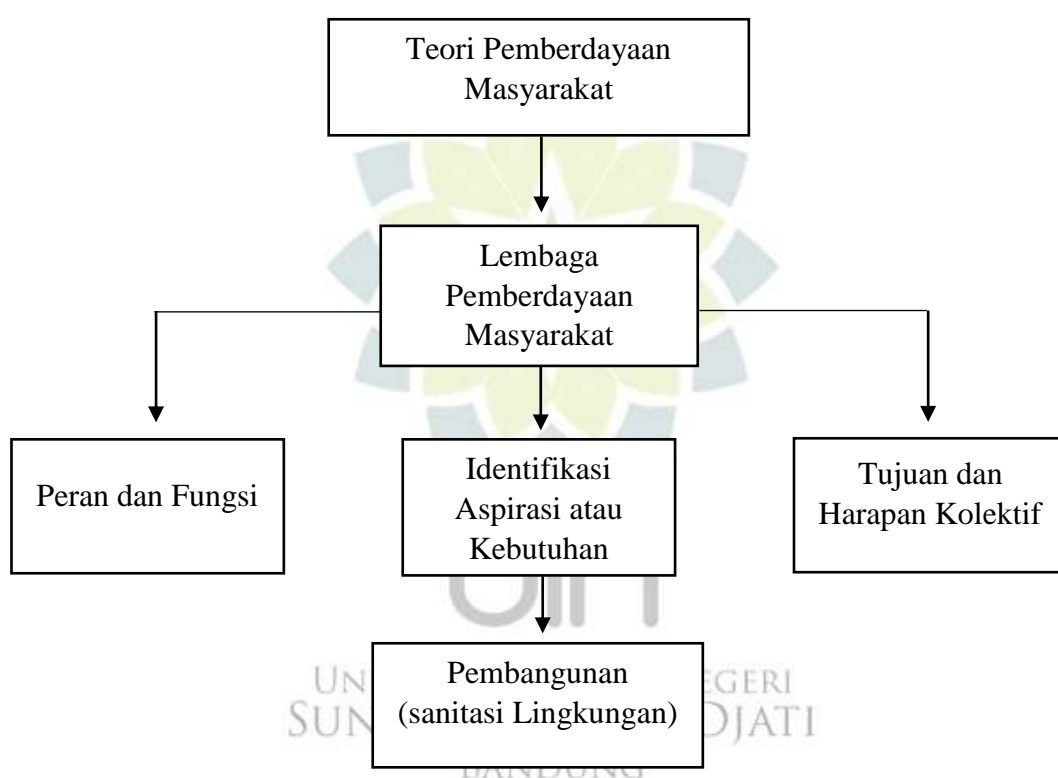
3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan model konseptual variabel-variabel penelitian tentang bagaimana keterhubungan teori-teori dengan variabel-variabel penelitian yang diteliti yaitu variabel bebas dengan variabel terikat. Perlu dikemukakan dalam sebuah penelitian apabila penelitian berkaitan dengan dua variabel atau lebih (Iskandar, 2008:54).

Teori pemberdayaan masyarakat dari Edi Suharto, Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan terhadap pembangunan desa untuk menciptakan pembangunan sanitasi lingkungan secara partisipatif salah satunya melalui peran LPMD. LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) dalam pemberdayaan masyarakat dengan cara membangun partisipasi masyarakat

atau peran masyarakat, serta tidak lepas dari peran pemerintahan desa dan lembaga. Sehingga, konsep pemberdayaan masyarakat yakni dari tidak berdaya menjadi berdaya, mandiri dan madani menuju masyarakat yang sejahtera dan makmur.

Bagan Karangka Konseptual



1.6. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Jln. Kp. Cibungbulang Rt. 01 Rw. 11 Desa. Cisomang Barat Kec. Cicalong Wetan Kab. Bandung Barat 40556.

2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma adalah sebuah teori tentang ilmu pengetahuan atau kerangka konseptual atau kerangka berpikir hasil pemikiran pendapat para ahli atau ilmuan yang menjadi pokok pembahasan ilmu pengetahuan.

Sedangkan, pendekatan adalah proses kegiatan pendekatan dengan cara pendekatan seorang peneliti terhadap objek penelitian melalui berbagai metode-metode untuk mencapai hasil penelitian.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian penulis yang digunakan pada penelitian ialah metode deskriptif. Menurut Dadang Kuswana (2011: 37), metode deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah-masalah yang diteliti sesuai dengan keadaan apa adanya yaitu tanpa ditambah dan dikurangi. Selanjutnya, dilakukan penafsiran terhadap data yang ada sebagai solusi masalah yang muncul dalam penelitian.

4. Jenis Data dan Sumber Data

1) Jenis Data

Jenis data dalam penelitian penulis yang dikumpulkan yaitu data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dan peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif memfokuskan makna (Dadang Kuswana, 2011: 43).

2) Sumber Data

Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Menurut Saifudin data penelitian terbagi menjadi data *primer* dan *sekunder* (Saifuddin, 1999: 91).

Sumber data *primer*, *person* dan *place* diperlukan untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dilapangan terutama partisipasi masyarakat dalam pembangunan sanitasi lingkungan desa Cisomang Barat melalui wawancara mendalam terhadap tokoh masyarakat dan masyarakat Cisomang Barat, LPMD dan Pengurus LPMD. Sedangkan data *sekunder*, untuk melengkapi data-data yang diperlukan dari buku-buku, majalah, dokumentasi, journal dan artikel.

5. Penentuan Informasi dan Unit Penelitian

1) Informasi dan Unitt Analisis

Sesuatu yang berkaitan dengan penelitian yang fokus atau komponen yang diteliti supaya *reabilitas* dan *validitas*, dan membedakan antara subjek ataupun objek penelitian yang diteliti.

2) Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan sebagai sumber data dalam penelitian yang didasarkan pada permasalahan, data dan informasi seputar obyek penelitian. Menentukan informan yang memiliki kriteria tertentu yang akan membantu penelitian secara mendalam, jelas dan akurat diantaranya masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintahan desa, pengurus dan anggota atau pegawai LPMD Cisomang Barat atau orang yang berpengaruh di desa tersebut.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara: *Studi Kepustakaan*, dengan menggunakan studi kepustakaan penulis berusaha menelaah melalui buku-buku, majalah, journal, Undang-undang, Peraturan perundang-undangan dan dokumen yang lainnya yang sesuai dengan penelitian yang diteliti. *Studi Lapangan*, dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan untuk melakukan penelitian melalui lokasi atau obyek yang telah ditentukan secara langsung dengan cara; wawancara terhadap pengurus, anggota atau pegawai LPMD. Observasi melakukan pengamatan langsung terhadap LPMD desa Cisomang Barat. Dokumentasi memperoleh data-data dokumentasi di LPMD Cisomang Barat seperti berkas-berkas, asrip-arsip atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti. (Sugiyono, 2010:329).

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Teknik penentuan keabsahan data dalam penelitian dilakukan dengan langkah analisis data dalam menguji keabsahan data penelitian *triangulasi*, yakni dengan cara penelitian mengomparasikan hasil data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui wawancara dan mengomparasikan hasil temuan data dari informan dan informan yang lainnya ditempat dan waktu yang berbeda (Dadang Kuswana, 2011: 264).

Teknik penentuan keabsahan data langkah yang dilakukan melalui wawancara terhadap pemerintahan desa, LPMD, masyarakat desa Cisomang Barat untuk mendapatkan informasi dan hasil data yang ditemukan.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian dilakukan selama penelitian berlangsung dilapangan. Analisis data dimulai saat merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum melakukan ke lapangan penelitian, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai teori yang grounded. Analisis isi data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data, kemudian dilanjutkan setelah selesai pengumpulan data (Dadang Kuswana, 2011: 261).

Reduksi Data, data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang dicatat, dikumpulkan, dilakukan analisis data yang memfokuskan pada data yang diperlukan serta disusun secara teliti dan terperinci sehingga data yang diperoleh sistematis.

Penyajian Data, setelah melakukan reduksi data maka dilakukan penyajian data dalam penelitian kualitatif. Data yang terkumpulkan kemudian dilakukan penghubung data dengan data yang lain, supaya data terkumpul untuk merencanakan penyajian data selanjutnya yang disusun secara sistematis dan lengkap.

Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi, setelah data terkumpulkan secara lengkap maka dilakukan kesimpulan atau verifikasi data untuk mempermudah penguasaan data dan penjelasan terhadap data penelitian.